

*Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya*



Sekda Busel La Ode Harwanto

Laporan: Firman

Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd. itu menetapkan 57 aparatur sipil negara (ASN) memenuhi syarat untuk melaju ke tahapan assessment atau penilaian kompetensi dari 59 berkas yang diproses Panitia Seleksi (Pansel)

Ketua Panitia Seleksi La Ode Har-

Lanjut ke Hal: 7

BUTON SELATAN, BP- Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi pengisian jabatan tahun 2026. Pengumuman yang ditandatangani Ketua Panitia

LAYANAN 24 JAM, AMAN & TERPERCAYA

## PMB HAFIZAH BAUBAU

HADIRKAN PENDAMPINGAN IBU DAN BAYI DARI HAMIL HINGGA NIFAS, FASILITAS LENGKAP DAN HUMANIS

PMB Hafizah Baubau berkomitmen memberikan layanan kesehatan ibu dan anak yang profesional, aman, nyaman, dan humanis. Didukung tenaga kompeten dan fasilitas modern, kami siap mendampingi Anda 24 jam penuh.

SETIAP PERSALINAN DIDAMPINGI 3 BIDAN

### LAYANAN KAMI

- ✓ Persalinan 24 Jam
- ✓ Pemeriksaan Kehamilan
- ✓ Pelayanan KB
- ✓ Pemeriksaan IVA & IVA Test
- ✓ Tembak Telinga
- ✓ Baby Spa
- ✓ Pelayanan Kesehatan Umum bersama dr. Aldino Siwa Putra



- Pendampingan Maksimal**  
Sejak hamil, persalinan, hingga masa nifas.
- Kunjungan Rumah**  
Pemantauan kondisi ibu & bayi setelah pulang.
- Layanan Eksklusif**  
Pengantaran pulang, souvenir & foto estetik bayi.
- Didukung BPJS Kesehatan**  
Melayani persalinan, kehamilan, KB & bantu pengurusan BPJS bayi.
- Dipercaya Masyarakat**  
Pasien datang dari Baubau, Wakatobi (Kaledupa), Buton Selatan (Kadatua) dan sekitarnya.

Pimpinan PMB Hafizah  
Bdn Harafiah, S.ST., C.MSHT., C.BMHT  
6 Bidan Profesional  
1 Dokter Umum  
(dr. Aldino Siwa Putra)

- ### PERIZINAN LENGKAP
- ✓ Surat Izin Praktik (SIP)
  - ✓ Surat Tanda Registrasi (STR)
  - ✓ Dokumen sesuai ketentuan pemerintah

- ### FASILITAS LENGKAP & NYAMAN
- Ruang persalinan ber-AC
  - Kamar mandi dalam
  - Oksigen
  - Alat sterilisator
  - Peralatan medis standar pelayanan kesehatan

"Kami hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi ibu dan bayi, karena kesehatan adalah awal kebahagiaan keluarga."

SIAP MELAYANI ANDA 24 JAM PENUH

HUBUNGI KAMI  
0822 8000 2240  
pmb\_hafizah  
Pmb Hafizah

Laporan: Prasetyo M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU BP-Praktik Mandiri Bidan (PMB) Hafizah di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui layanan persalinan humanis, pendampingan intensif, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan selama 24 jam guna menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Baubau dan daerah kepulauan sekitarnya.

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tersebut terlihat dari banyaknya pasien yang datang tidak hanya dari Kota Baubau, tetapi juga dari Kabupaten Wakatobi, khususnya Kecamatan Kaledupa, serta Kabupaten Buton Selatan, termasuk wilayah Kadatua. Kepercayaan itu dibangun melalui pelayanan yang mengedepankan kenyamanan pasien sejak masa kehamilan hingga pascapersalinan.

Pemilik PMB Hafizah, Bdn Hara-

Lanjut ke Hal: 7

## Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Tekankan Peran Pelajar dalam Menjaga Lingkungan Berkelanjutan, SMPN 5 Baubau Jadi Pusat Edukasi Lingkungan dalam Rangkaian HLHS 2026



Laporan: Prasetyo

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat upaya pendidikan lingkungan kepada generasi muda dengan menggelar kerja bakti, penghijauan, dan pelatihan pembuatan kom-

pos di SMP Negeri 5 Baubau, Kamis (18/6). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dilaksanakan selama satu bulan.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Kota Baubau, Amiruddin, S.Kel., M.Si., menga-

takan kegiatan itu bertujuan menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini kepada para siswa agar memahami pentingnya menjaga kelestarian alam serta dampak yang ditimbulkan apabila lingkungan mengalami kerusakan. Dalam pelaksanaannya, DLH menurunkan sekitar

50 personel yang terdiri atas aparatur sipil negara, petugas taman, dan petugas kebersihan jalan.

Selain kerja bakti dan penghijauan, para siswa mendapatkan pelatihan mengolah sampah organik berupa dedaunan dan ranting menjadi kompos. Program tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik di lingkungan sekolah maupun rumah tangga.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu menegaskan bahwa persoalan sampah dan lingkungan hidup tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut dia, keterlibatan mas-

Lanjut ke Hal: 7

## Buton Selatan Peringkat Keempat Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Kabupaten Buton Selatan menempati peringkat keempat tertinggi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di antara 13 kabupaten non-Indeks Harga Konsumen (non-IHK) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu Ketiga (M-III) Juni 2026. Nilai IPH daerah tersebut mencapai 2,91 persen,

menandakan adanya tekanan harga yang cukup signifikan dan mendorong perlunya langkah pengendalian yang lebih intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Data tersebut menunjukkan bahwa Buton Selatan berada di bawah Kabupaten Muna yang mencatat IPH 4,23 persen, Kabupaten Konawe Selatan 4,16 persen, dan Kabupaten Bu-

ton Utara 3,75 persen. Sementara itu, secara regional Provinsi Sulawesi Tenggara mem-bukukan IPH sebesar 2,12 persen dengan seluruh 13 kabupaten non-IHK mengalami inflasi.

Komoditas beras menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Buton Selatan dengan andil 1,217,

Lanjut ke Hal: 7

## PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas Lengkap dan Humanis

fiah, S.ST., C.MSHT., C.BMHT, mengatakan pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang lebih personal dibandingkan layanan kesehatan sejenis. "Kami berusaha memberikan pendampingan maksimal sejak masa kehamilan, proses persalinan, hingga masa nifas agar ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman," ujarnya, Minggu (21/6).

Dalam setiap proses persalinan, PMB Hafizah menerapkan sistem pendampingan oleh tiga bidan sekaligus. Saat ini fasilitas tersebut didukung enam bidan, termasuk pemilik praktik, serta seorang dokter umum, dr. Aldino Siwa Putra. "Untuk pelayanan persalinan, kami melibatkan tiga bidan agar keselamatan dan kenyamanan ibu maupun bayi dapat terjaga secara optimal," kata Harafiah.

Selain layanan per-

salinan 24 jam, PMB Hafizah juga menyediakan pemeriksaan kehamilan, pelayanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan IVA dan IVA Test, tembak telinga, Baby Spa, serta pelayanan kesehatan umum. Seluruh layanan tersebut didukung dengan kelengkapan perizinan, mulai dari Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR), hingga dokumen administrasi lain yang dipersyaratkan pemerintah.

PMB Hafizah juga memfasilitasi peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan persalinan, pemeriksaan kehamilan, dan KB. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan tersebut turut membantu pengurusan kepesertaan BPJS bagi bayi yang baru lahir dari orang tua yang telah terdaftar sebagai peserta. "Mayoritas masyarakat saat ini menggunakan BPJS Kesehatan sehingga

kami berupaya membantu agar pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau," ujar Harafiah.

Sebagai bentuk pelayanan berkelanjutan, PMB Hafizah melakukan pemanfaatan pascapersalinan melalui kunjungan rumah. Bahkan bagi pasien yang masih berdomisili di wilayah Kota Baubau, pihaknya turut membantu proses pengantaran pulang serta memberikan souvenir dan dokumentasi foto bayi sebagai kenang-kenangan bagi keluarga. "Kami ingin pasien merasa diperhatikan sejak datang hingga kembali ke rumah," katanya.

Dari sisi fasilitas, PMB Hafizah menyediakan ruang persalinan yang nyaman dengan pendingin ruangan (AC), kamar mandi dalam, oksigen, alat sterilisator, serta peralatan medis yang memenuhi standar pelayanan kesehatan. Penguatan fasilitas ini

sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Secara historis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF selama dua dekade terakhir terus mendorong pendekatan respectful maternity care atau pelayanan persalinan yang hormat martabat ibu. Di Indonesia, upaya penurunan angka kematian ibu juga menjadi agenda penting pemerintah sejak pelaksanaan target Millennium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs). Kehadiran fasilitas kesehatan berbasis komunitas seperti PMB Hafizah dinilai berperan dalam memperluas akses layanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. (\*)

## Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Tekankan Peran Pelajar dalam Menjaga Lingkungan Berkelanjutan, SMPN 5 Baubau Jadi Pusat Edukasi Lingkungan dalam Rangkaian HLHS 2026

menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

"Persoalan lingkungan hidup dan sampah harus dibagi perannya. Dimulai dari individu, keluarga, lingkungan sekolah hingga masyarakat secara keseluruhan," kata Wa Ode Hamsina Bolu saat menghadiri kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, pendidikan lingkungan perlu dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. "Kita mulai dari diri sendiri, bagaimana memelihara lingkungan dan mengelola sampah yang kita hasilkan. Setelah itu berkembang ke lingkungan rumah, kemudian sekolah," ujarnya.

Menurut Wa Ode Hamsina Bolu, Pemerintah Kota Baubau akan terus memperluas program edukasi lingkungan melalui kerja sama dengan sekolah, kelurahan, fasilitas umum, dan komunitas masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan dukungan pemerintah pusat guna menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan.

Secara historis, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni sejak ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Stockholm tahun 1972. Di Indonesia, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran publik terhadap isu lingkungan, sejalan dengan berbagai program pengurangan sampah dan rehabilitasi kawasan hijau yang terus didorong pemerintah di tingkat nasional.

Kepala SMP Negeri 5 Baubau, Machmud, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas dipilihnya sekolah tersebut sebagai lokasi kegiatan. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan arahan dari Ibu Wakil Wali Kota serta Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi siswa dalam memahami pentingnya menjaga lingkungan," katanya. (\*)

## Buton Selatan Peringkat Keempat Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar

disusul bawang merah sebesar 0,6022 dan minyak goreng sebesar 0,4193. Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh dominan terhadap pembentukan inflasi daerah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari.

"Pemantauan stok dan kelancaran distribusi beras, bawang merah, serta minyak goreng perlu terus diperkuat agar gejolak harga dapat dikendalikan," demikian rekomendasi yang disampaikan dalam laporan evaluasi sebagai tindak lanjut pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Selatan.

Selain memperketat pengawasan distribusi, TPID juga didorong untuk menggelar Operasi Pasar maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) yang difokuskan pada komoditas penyumbang utama inflasi. "Intervensi pasar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," de-

mikian salah satu poin rekomendasi dalam laporan tersebut.

Secara historis, beras hampir selalu menjadi komoditas strategis yang memengaruhi laju inflasi di Indonesia, terutama ketika pasokan terganggu akibat faktor musim, distribusi, maupun perubahan biaya produksi. Di tingkat nasional, pemerintah secara berkala memanfaatkan cadangan pangan dan operasi pasar sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Dalam konteks global, fluktuasi harga pangan juga menjadi perhatian banyak negara sejak beberapa tahun terakhir akibat gangguan rantai pasok internasional, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi perdagangan komoditas. Kondisi tersebut menjadikan penguatan ketahanan pangan lokal dan distribusi yang efisien sebagai strategi penting untuk meredam tekanan inflasi.

Adapun pering-

kat IPH kabupaten non-IHK di Sulawesi Tenggara pada periode tersebut menempatkan Kabupaten Muna di posisi pertama dengan 4,23 persen, diikuti Konawe Selatan 4,16 persen, Buton Utara 3,75 persen, Buton Selatan 2,91 persen, Buton 2,40 persen, Konawe Kepulauan 2,12 persen, Wakatobi 1,57 persen, Buton Tengah dan Bombana masing-masing 1,49 persen, Kolaka Timur 0,63 persen, Konawe Utara 0,26 persen, Kolaka Utara 0,23 persen, serta Muna Barat 0,14 persen.

Dengan posisi tersebut, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan di Buton Selatan menjadi langkah yang dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga pangan. "Sinergi lintas sektor diperlukan agar stabilitas harga tetap terjaga dan tekanan inflasi tidak semakin meningkat," demikian penegasan dalam rekomendasi evaluasi yang ditujukan kepada instansi terkait. (\*)

## Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya

wanto, S.Pd., M.Pd. menegaskan bahwa peserta yang lolos administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Peserta yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti assessment sebagai bagian dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," demikian bunyi pengumuman resmi panitia.

Berikut ini nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan dinas yang akan diisi jabatannya. Pada formasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi yakni La Bariu, S.Pd., Wa Liyana, S.E., La Ode Muhammad Alauddin, S.Sos., M.Si., dan La Ode Firman Hamzah, S.Pd., M.Si.

Untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, panitia meloloskan Yerti, SKM., M.Si., dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ked., Bakri Abdullah, SKM., M.MKes., serta Ira Yusnita, S.Si.T., M.Kes.

Sementara pada formasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

peserta yang lolos administrasi adalah Julan Satriah, S.T., M.Si., Iwan Mulyawan, S.T., M.Si., dan Akhmad, S.IP., M.Si. dan Darmin SPd. MMkes

Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Abdul Rahman Maini, S.E., La Ode Hasri, S.Sos., M.Si., Herniati Antji, S.P., La Ode Suharji, S.Kom., La Ode Muhammad Ilmayang Amlu, S.H.,

Persaingan paling banyak terlihat pada jabatan formasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, peserta yang lolos terdiri atas La Ode Muhammad Saidiman, S.STP., M.Si., Rusman Alam Purnama, S.STP., Drs. Aston Zalim, La Ode Muhammad Asdar, S.E., La Ode Risawal, S.Sos., M.Si., dan Muliadin, S.Pd., M.Kes. Megawati, S.E., M.Si., Diki Hermanto, S.E., dan La Ode Miru, S.Pd., M.Si.

Adapun untuk Kepala Dinas Perikanan, panitia menetapkan Madina Hasmar, S.Pi., Muhammad Dafis Kasri, S.Pi., Dudi Masrun, S.P., dan Syamsul, SKM., M.Si. sebagai peserta yang memenuhi syarat administrasi.

Selanjutnya, pem-

inat terbanyak juga terlihat pada formasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, nama-nama yang lolos administrasi meliputi Muhammad Basri, S.STP., La Ode Nur Alim Mbay, S.Sos., Ahmad Rizal, S.Pi., M.Si., Muhamad Al Ichsan A., S.Pd., M.Si., La Juhia, S.Sos., Sadidi, S.Sos., M.Si., serta La Ode Mastatar Mas'ud, SKM., M.Si. Musri, S.Pd., Muh. Hasan Mukhtar Munzilul, S.T., dan La Amiruddin, S.Pd., M.Si.

Untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, peserta yang dinyatakan lolos administrasi yakni Moh. Taufan Bachtiar, S.T., M.T., Nafiruddin, S.E., La Ode Muhammad Musnawir, S.T., M.Si., La Ode Muhammad Hidayat, S.T., M. Wahyuddin, S.T., M.Si., La Ode Daniel, S.E.

Pada seleksi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, jumlah pelamar yang memenuhi syarat juga cukup banyak, yaitu, Hasmin Joko, S.E., M.Si., La Ode Muhammad Mustari, S.P., M.Si., Hariyati Kanang, SKM., M.Kes., dan La Ode Muhuni, S.Sos., M.Si. Sementara itu, pada formasi Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi terdiri atas La Ode Aguslim Arwin, SKM., M.Si., Wa Ode Asrina Azizah Tasrif, S.Kom., M.Si., Nuhul Mufida, S.Psi., M.Si., Mudin, S.Pd., M.Pd., La Ode Aris Hardian, S.T., M.Si., Sukman Efendi, S.STP., dan Haida, S.Pt.

"Peserta yang tidak mengikuti assessment sesuai jadwal akan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya," demikian penegasan Panitia Seleksi dalam pengumuman resmi tersebut. Assessment dijadwalkan berlangsung pada 24-25 Juni 2026 di Assessment Center Poldasulawesi Tenggara di Kendari.

Seleksi terbuka JPT Pratama merupakan implementasi sistem merit yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak lahirnya reformasi manajemen aparatur sipil negara melalui Undang-Undang ASN. Mekanisme ini menekankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak sebagai dasar utama promosi pejabat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Secara global, sistem seleksi berbasis merit juga menjadi standar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara. Organisasi internasional seperti OECD mendorong pemerintah menerapkan proses rekrutmen dan promosi yang transparan, kompetitif, ser-

ta bebas intervensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dengan diumumkankannya hasil seleksi administrasi tersebut, puluhan ASN dari berbagai instansi di Buton Selatan maupun daerah lain kini ber-

siap menghadapi tahapan penilaian kompetensi. Hasil assessment nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan calon pejabat yang akan menduduki sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (\*)

## PSI Tegaskan Nur Alam Bukan Anggota, KPK Ingatkan Rekrutmen Kader Politik



Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bertemu Jokowi di Solo

### Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, tidak pernah tercatat sebagai anggota maupun pengurus partai. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya kabar yang menyebut mantan terpidana korupsi itu telah bergabung dengan PSI, yang kemudian mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara PSI, Bestari Barus, mengatakan hingga saat ini tidak ada proses administrasi maupun pengajuan resmi dari Nur Alam untuk menjadi kader partai ber lambang gajah tersebut. Karena itu, PSI memastikan informasi mengenai bergabungnya Nur Alam tidak sesuai dengan fakta yang ada di internal partai.

Menurut Bestari, setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan bergabung dengan partai politik mana pun. Namun, hak tersebut tetap harus dijalankan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Pak Nur Alam itu tidak pernah menjadi anggota PSI dan sampai hari ini belum pernah mengajukan diri menjadi pengurus maupun anggota partai," kata Bestari dalam keterangannya, Minggu (21/6).

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons PSI terhadap komentar KPK yang sebelumnya menyoro ti kabar bergabungnya Nur Alam ke partai politik. Bestari mengaku menghargai perhatian yang diberikan lembaga antirasuah

tersebut terhadap PSI. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan anggota di PSI dilakukan secara berjenjang dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dukungan politik atau kedekatan personal. Setiap calon anggota wajib mengikuti prosedur dan verifikasi yang telah ditetapkan partai.

"Bergabung dengan PSI ada mekanismenya. Tidak cukup hanya memiliki keinginan, tetapi harus melalui proses yang berlaku di partai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bestari mengungkapkan bahwa pihaknya mengetahui adanya minat dari anak dan istri Nur Alam untuk bergabung dengan PSI. Namun hingga kini, proses tersebut masih menunggu langkah resmi dari yang bersangkutan.

Menurut dia, apabila keluarga Nur Alam benar-benar mengajukan diri sebagai anggota PSI, maka proses kaderisasi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tanpa perlakuan khusus.

Sebelumnya, KPK menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun lembaga tersebut mengingatkan pentingnya mempertimbangkan status hukum seseorang yang pernah terlibat perkara korupsi sebelum direkrut menjadi kader partai politik.

"KPK menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Meski demikian, Budi menegaskan bah-

wa partai politik perlu memperhatikan berbagai aspek hukum, termasuk kemungkinan adanya pembatasan hak politik atau status pembebasan bersyarat yang masih melekat pada seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi.

"Partai politik perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses rekrutmen kader maupun pengisian jabatan politik," ujarnya.

KPK menilai partai politik memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, kualitas rekrutmen politik menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Nur Alam sendiri merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang tersandung kasus korupsi terkait suap dan gratifikasi dalam pemberian sejumlah izin usaha pertambangan. Kasus tersebut menjadi salah satu perkara korupsi besar yang ditangani KPK pada periode 2016-2018.

Pada Oktober 2016, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka. Ia kemudian mengajukan gugatan prapradil ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugurkan status tersangkanya. Namun gugatan tersebut ditolak majelis hakim.

Setelah menjalani proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Nur Alam. Putusan tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 15 tahun penjara serta disertai pencabutan hak politik.

Dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung

mengurangi hukuman Nur Alam menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim menilai unsur memperkaya diri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, sementara unsur gratifikasi tetap dinyatakan terbukti.

Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nur Alam juga tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya menjalani masa pidana hingga memperoleh pembebasan bersyarat pada 16 Januari 2024.

Secara historis, pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah tokoh politik yang terjerat kasus korupsi juga pernah dikenai sanksi serupa sebagai bagian dari putusan pengadilan. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga integritas jabatan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Di tingkat internasional, berbagai negara juga menerapkan pembatasan terhadap mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan publik dalam jangka waktu tertentu. Praktik tersebut diterapkan antara lain di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin sebagai bagian dari agenda reformasi politik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kasus yang melibatkan Nur Alam kembali mengingatkan pentingnya komitmen partai politik dalam menjalankan rekrutmen kader secara transparan dan akuntabel. Di tengah tuntutan publik terhadap integritas pejabat negara, seleksi kader yang ketat dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi dan pemberantasan korupsi. (\*)

## Misbakhun Dorong Kritik Konstruktif, Soroti Posisi Politik PDIP

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun meminta seluruh elite politik dan partai politik mengedepankan kedewasaan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan elemen penting dalam demokrasi, tetapi harus disertai solusi agar tidak memperkeruh situasi politik nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat menanggapi dinamika politik nasional yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kritik yang dilontarkan sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Misbakhun, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai setiap kritik seharusnya mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah sehingga dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.

Ketua Komisi XI DPR RI itu menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo tidak menutup diri terhadap kritik. Ia mencontohkan berbagai masukan terkait dugaan penyelewengan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Bagi Misbakhun, sikap terbuka pemerintah tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi tetap berjalan. Karena itu, kritik yang muncul seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kebijakan publik, bukan sekadar menjadi instrumen persaingan politik.

Ia kemudian menyoro ti posisi politik

PDIP yang menya-takan diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Menurut Misbakhun, setiap partai politik perlu menunjukkan sikap yang jelas agar publik dapat memahami arah perjuangan politik yang diperjuangkan.

"Partai politik semestinya menentukan posisi secara tegas, apakah berada di dalam pemerintahan atau memilih berada di luar pemerintahan," katanya.

Misbakhun menilai praktik politik yang mengambil keuntungan dari dua posisi sekaligus tidak mencerminkan etika demokrasi yang sehat. Ia menyebut sikap tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai orientasi politik sebuah partai.

"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, saat ada masalah langsung mengkritik keras. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tegasnya.

Pernyataan Misbakhun tersebut muncul setelah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan bahwa partainya menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintahan. Menurut Deddy, dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen membuat fungsi pengawasan DPR perlu diperkuat oleh kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan.

Deddy berpendapat bahwa demokrasi membutuhkan kontrol terhadap kekuasaan agar kebijakan publik tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia mengingatkan bahwa parlemen tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" ujar Deddy.

Perdebatan mengenai fungsi oposisi dan penyeimbang sejatinya bukan hal baru dalam

sejarah politik Indonesia. Pada era Reformasi pasca-1998, sistem multipartai mendorong munculnya berbagai konfigurasi koalisi dan oposisi yang berubah-ubah sesuai dinamika politik nasional.

Secara historis, Indonesia memang tidak mengenal konsep oposisi formal seperti yang diterapkan di sejumlah negara dengan sistem parlementer, seperti Inggris. Dalam sistem Westminster yang berkembang di Inggris, oposisi bahkan memiliki status resmi sebagai "His Majesty's Loyal Opposition" yang berfungsi mengawasi pemerintah secara institusional tanpa mengganggu stabilitas negara.

Di Indonesia, fungsi pengawasan lebih banyak dijalankan melalui mekanisme parlemen, partai politik, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga independen yang menjadi bagian dari sistem demokrasi modern.

Pengamat politik menilai perbedaan pandangan antara Golkar dan PDIP mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat selama tetap berada dalam koridor konstitusi. Kritik dan dukungan terhadap pemerintah merupakan bagian dari proses politik yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik internasional, serta agenda pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah, stabilitas politik dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap arah pembangunan Indonesia.

Karena itu, sejumlah kalangan berharap perdebatan politik yang berkembang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, melainkan mampu menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang memperkuat kualitas demokrasi serta efektivitas pemerintahan dalam melayani masyarakat. (\*)

## DPRD Kendari Mulai Evaluasi APBD 2025, Pendapatan Daerah Terealisasi Rp1,57 Triliun



Laporan: Lisna

KENDARI, BP DPRD Kota Kendari mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat bersama pemerintah kota yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Kendari, Senin (22/6/2026). Pembahasan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja fiskal daerah, termasuk capaian pendapatan, realisasi belanja, pembiayaan, hingga posisi kewajiban keuangan pemerintah daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, itu dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Kendari.

Dalam pemaparannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp1.570.028.610.419,93 atau 92,26 persen dari target sebesar Rp1.713.070.105.520.

"Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.570.028.610.419,93 dari target Rp1.713.070.105.520 atau terealisasi sebesar 92,26 persen," ujar Amir Hasan saat menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.

Selain pendapatan, pemerintah kota juga melaporkan realisasi belanja daerah yang mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen dari target belanja sebesar Rp1,67 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pada sektor pembiayaan, Pemkot Kendari mencatat realisasi pembiayaan neto sebesar minus Rp38,39 miliar atau hampir 100 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Amir Hasan menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tersebut masih akan dibahas lebih rinci pada tahapan berikutnya bersama masing-masing OPD untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial.

"Laporan ini menjadi gambaran umum kondisi fiskal daerah yang nantinya akan dibahas lebih detail bersama perangkat daerah terkait pada tahapan selanjutnya," kata Amir Hasan.

Di tengah pembahasan tersebut, posisi utang Pemerintah Kota Kendari hingga 31 Desember 2025 turut menjadi perhatian para anggota DPRD. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, total kewajiban yang masih harus diselesaikan mencapai Rp510,6 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp242,49 miliar yang mencakup utang pegawai, utang jasa, dan kewajiban kepada pihak ketiga. Adapun utang jangka panjang tercatat sebesar Rp268,10 miliar yang berasal dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk pokok pinjaman, bunga, serta biaya pengelolaan dana.

Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kewajiban keuangan secara bertahap. Hingga Juni 2026, Pemkot Kendari telah melunasi utang senilai Rp106.611.890.807.

"Alhamdulillah sampai bulan Juni 2026 kami telah melunasi kewajiban Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp106.611.890.807," ungkap Amir Hasan.

Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, menegaskan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik sekaligus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"DPRD akan mencermati seluruh laporan realisasi anggaran dan kinerja perangkat daerah sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025," ujar Inarto dalam rapat tersebut.

Secara historis, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan agenda rutin yang dilakukan seluruh pemerintah daerah di Indonesia setelah berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Pada tingkat nasional, tren pengelolaan keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap efektivitas belanja dan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Pemerintah pusat juga terus mendorong transparansi fiskal melalui digitalisasi sistem keuangan daerah dan penguatan pengawasan internal.

Sementara itu, secara internasional, prinsip akuntabilitas fiskal telah menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan modern. Organisasi seperti International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) secara konsisten mendorong pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan keterbukaan laporan keuangan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Kota Kendari selanjutnya akan berlanjut pada tahap pembahasan teknis bersama OPD terkait sebelum memasuki proses pengambilan keputusan di DPRD. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sekaligus pijakan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang. (\*)

## Kafilah Kendari Promosikan Tenun Lokal dan Syiar Islam pada MTQ XXXI Sultra



Laporan: Mashuri

KONAWE, BP-Kafilah Kota Kendari menampilkan perpaduan nilai budaya dan keagamaan saat mengikuti Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Kabupaten Konawe, Selasa (23/6/2026). Dengan mengenakan busana tenun khas daerah dan diiringi kendaraan hias bernuansa Islami, rombongan Kendari menjadi salah satu peserta yang menarik perhatian masyarakat sepanjang rute pawai.

Kehadiran Kota Kendari dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan MTQ XXXI Sultra yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Konawe. Ajang tersebut merupakan perhelatan keagamaan terbesar di Sulawesi Tenggara yang mempertemukan kafilah dari seluruh kabupaten dan kota.

Rombongan Kota Kendari dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, Fadlil Suparman. Para peserta yang terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah tampil seragam menggunakan busana berbahan tenun khas Sulawesi Tenggara.

Pemilihan tenun daerah tidak hanya menjadi simbol kecintaan terhadap budaya lokal, tetapi juga sarana memperkenalkan kekayaan wastra Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pelestarian budaya daerah yang terus didorong pemerintah di berbagai tingkatan.

"Busana tenun yang kami gunakan merupakan bagian dari identitas budaya daerah yang patut dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda," ujar Fadlil Suparman dalam rangkaian kegiatan pawai.

Sepanjang perjalanan menuju panggung kehormatan, rombongan Kota Kendari membawa atribut daerah yang mencerminkan

nilai religius, semangat persatuan, dan kebersamaan. Kendaraan hias yang dihiasi ornamen Islami semakin memperkuat pesan syiar keagamaan yang menjadi ruh penyelenggaraan MTQ.

Setibanya di panggung utama, kafilah Kota Kendari mendapat sambutan dari Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe, serta Sekretaris Daerah Kota Kendari. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap partisipasi aktif seluruh daerah dalam menyaksikan MTQ tingkat provinsi.

"Partisipasi seluruh kabupaten dan kota menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat syiar Islam serta menjaga persatuan masyarakat Sulawesi Tenggara," kata salah seorang panitia penyelenggara saat acara berlangsung.

Pawai Ta'aruf merupakan agenda pembukaan yang selalu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan MTQ. Selain memperkenalkan para peserta dan kafilah, kegiatan ini menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat ukhuwah Islamiyah antarwarga dan antardaerah.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sepanjang jalur pawai. Ribuan warga memadati sejumlah titik untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang menampilkan berbagai kekhasan budaya dari daerah masing-masing. Kehadiran kendaraan hias dengan beragam tema keislaman menambah semarak suasana pembukaan.

"MTQ bukan hanya perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat," ujar seorang tokoh masyarakat yang hadir menyaksikan pawai.

Secara historis, Musabaqah Tilawatil Qur'an di Indonesia pertama kali diselenggarakan secara nasional pada tahun 1968 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, MTQ berkembang menjadi agenda nasio-

al yang tidak hanya berfokus pada perlombaan tilawah, tetapi juga menjadi media dakwah, pendidikan Al-Qur'an, dan pembangunan karakter umat.

Dalam konteks internasional, berbagai negara muslim juga menyelenggarakan kompetisi tilawah Al-Qur'an berskala dunia. Salah satu yang paling dikenal adalah International Quran Competition di Malaysia yang telah berlangsung sejak awal 1960-an dan menjadi salah satu ajang tilawah paling bergengsi di dunia Islam.

Perkemangan MTQ di Indonesia turut memperlihatkan bagaimana syiar Islam dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya lokal. Di berbagai daerah, unsur seni, tradisi, dan identitas budaya kerap ditampilkan dalam pawai pembukaan maupun kegiatan pendukung MTQ tanpa mengurangi substansi keagamaan yang menjadi tujuan utama.

Melalui partisipasi pada MTQ XXXI Sultra 2026, Kota Kendari tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap pengembangan generasi Qurani, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Balutan tenun khas Sulawesi Tenggara yang dikenakan para peserta menjadi simbol harmonisasi antara nilai religius dan pelestarian warisan budaya.

"Momentum MTQ harus menjadi sarana memperkuat persaudaraan, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dan melestarikan budaya daerah sebagai identitas masyarakat Sulawesi Tenggara," ujar salah seorang peserta kafilah Kota Kendari.

Dengan penampilan yang kompak dan elegan, Kafilah Kota Kendari berhasil menegaskan komitmennya dalam mendukung syiar Islam sekaligus menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus modernisasi. Kehadiran mereka pada Pawai Ta'aruf MTQ XXXI Sultra menjadi bagian penting dari semangat membangun masyarakat religius, berbudaya, dan berdaya saing. (\*)

## Pemkab Buton Dorong ASN Miliki Rumah Layak Lewat Program FLPP Bersubsidi



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (15/6/2026).

Program FLPP diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi ASN sekaligus mendukung pengembangan kawasan permukiman yang lebih tertata di Kabupaten Buton.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton menegaskan bahwa penyediaan rumah layak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kita memiliki rencana pengembangan kawasan perumahan dengan dukungan lahan sekitar 25 hektare. Ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus menjawab kebutuhan hunian masyarakat,"

kata Alvin Akawijaya Putra.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pada penyediaan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan perumahan tersebut disiapkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah Pasarwajo sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terus berkembang. Ketersediaan lahan seluas sekitar 25 hektare menjadi modal awal untuk mewujudkan kawasan hunian baru yang terintegrasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, La Joni, S.T., M.Si., mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah layak di daerah tersebut masih tergolong tinggi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menemukan kondisi hunian yang dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga dalam satu rumah. Bahkan, terdapat rumah yang ditempati hingga lima kepala keluarga sekaligus.

"Di Kabupaten Buton ini ada rumah yang dihuni hingga lima kepala keluarga. Di sisi lain, rumah tidak layak huni juga masih cukup banyak. Kare-

na itu, program rumah subsidi melalui FLPP ini menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar La Joni.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau. Karena itu, keberadaan program FLPP dinilai penting untuk membantu masyarakat maupun ASN memperoleh akses pembiayaan perumahan dengan skema yang lebih ringan.

Secara nasional, program FLPP telah menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah dalam mengurangi angka backlog perumahan. Sejak diluncurkan pada 2010, program ini telah membantu jutaan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang terjangkau.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi. Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah melalui berbagai program subsidi, termasuk FLPP, guna menekan angka kekurangan rumah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional.

Di tingkat inter-

nasional, isu penyediaan hunian layak juga menjadi perhatian global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11, menekankan pentingnya pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Bupati Buton menilai pengembangan kawasan perumahan yang direncanakan pemerintah daerah sejalan dengan upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah," tegas Alvin.

Melalui sosialisasi dan edukasi FLPP tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton berharap ASN memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pembiayaan rumah subsidi. Pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan lahan yang siap dikembangkan agar program rumah subsidi yang direncanakan sebagai proyek percontohan (pilot project) dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya kawasan perkotaan baru di Pasarwajo.\*

## MTQ XXXI Sultra Jadi Ajang Buton Tengah Kenalkan Wisata dan Pendidikan



Laporan: Ardi

KONAWE, BP- Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos, menghadiri Pawai Ta'aruf dan Kendaraan Hias Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe, Selasa (23/6/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian pembukaan MTQ tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk memperkuat syiar Al-Quran sekaligus memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kehadiran Adam Basan bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Tengah Umi Noranah Azhari, Staf Ahli TP-PKK Kartini Adam Basan, serta jajaran pemerintah daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MTQ yang diikuti seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Pada perhelatan MTQ XXXI Sultra Tahun 2026, Kabupaten Buton Tengah mengirimkan 20 peserta yang akan berlaga pada tujuh cabang lomba. Para peserta didampingi 55 official, pelatih, dan pendamping yang bertugas memastikan kesiapan kafilah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kafilah Kabupaten Buton Tengah dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Abdullah dengan dukungan penuh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah. Kehadiran para peserta diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama baik daerah di tingkat provinsi.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Muh. Adam Basan menegaskan bahwa MTQ tidak hanya menjadi arena kompetisi membaca dan memahami Al-Qu-

ran, tetapi juga wadah pembinaan generasi muda Islam.

"Keikutsertaan dalam MTQ bukan semata-mata untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat syiar Al-Quran dan membentuk generasi yang berkarakter Qurani," kata Adam Basan.

Pawai Ta'aruf yang berlangsung meriah mengambil titik start di Tugu Tusawuta, Kecamatan Wawotobi, dan berakhir di Pelataran ICP Unaaha. Ribuan masyarakat memadati jalur pawai untuk menyaksikan penampilan kafilah dari berbagai daerah yang menampilkan identitas dan kekhasan masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Buton Tengah mengungkap identitas sebagai "Kota Santri dan Kota Pendidikan" di Negeri Seribu Gua. Melalui kendaraan hias dan atraksi budaya, daerah itu menampilkan berbagai potensi unggulan yang menjadi kekuatan pembangunan daerah.

Sektor pariwisata, perikanan, pendidikan, dan kebudayaan menjadi fokus utama yang diperkenalkan kepada masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi promosi daerah guna menarik perhatian publik terhadap berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

Adam Basan menilai momentum MTQ merupakan sarana efektif untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat citra positif daerah di tingkat regional.

"Kami berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan mengharumkan nama Kabupaten Buton Tengah," ujarnya.

Penampilan kafilah Buton Tengah juga merefleksikan visi pembangunan daerah Buton Tengah SERIUS yang merupakan akronim dari Sejahtera, Religius, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Visi tersebut menja-

di arah pembangunan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Azhari dan Wakil Bupati Muh. Adam Basan.

Secara historis, penyelenggaraan MTQ memiliki peran penting dalam perkembangan syiar Islam di Indonesia. MTQ Nasional pertama kali digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tahun 1968 dan sejak itu menjadi agenda rutin yang bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an melalui berbagai cabang perlombaan.

Dalam pengembangannya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi tilawah, tetapi juga mencakup cabang tafsir, fahmil Quran, syarhil Quran, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Quran, hingga hafalan Al-Quran. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen pembinaan umat Islam yang mendapat dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat.

Pada level internasional, tradisi musabaqah Al-Quran juga berkembang di berbagai negara Muslim. Arab Saudi, Mesir, Malaysia, Iran, dan Uni Emirat Arab secara rutin menyelenggarakan kompetisi Al-Quran tingkat dunia yang diikuti peserta dari puluhan negara. Indonesia sendiri kerap mencatat prestasi membanggakan melalui qari dan qariah yang meraih penghargaan dalam berbagai ajang internasional tersebut.

"MTQ adalah momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran, dan menumbuhkan semangat generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Islam," kata Adam Basan.

Melalui keikutsertaan pada MTQ XXXI Sultra di Konawe, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap syiar Islam semakin berkembang sekaligus memperluas pengenalan potensi daerah kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara lebih luas.\*

## BPOM Perkuat Pencegahan Penyalahgunaan OOT Lewat Festival Musik dan Edukasi Digital



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) di kalangan remaja melalui penyelenggaraan Safe Sound Fest 2026, sebuah festival musik pelajar tingkat SMA/SMK se-Jabodetabek yang digelar di SMAN 70 Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi puncak Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, organisasi profesi, serta kalangan pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan OOT yang dinilai dapat merusak kesehatan generasi muda sekaligus menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan kreatif berbasis musik dan teknologi digital, BPOM berupaya menghadirkan metode edukasi yang lebih dekat dengan kehidupan remaja.

Pada kesempatan itu, BPOM juga meluncurkan Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan (SIGAP OM), sebuah platform

digital yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Platform tersebut ditujukan bagi pelajar, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat umum.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan tantangan penyalahgunaan OOT perlu menjadi perhatian serius karena kelompok usia muda merupakan sasaran yang paling rentan. Menurut dia, akses yang relatif mudah dan harga yang terjangkau membuat OOT kerap disalahgunakan untuk memperoleh efek tertentu.

“Saat ini terdapat tantangan serius berupa penyalahgunaan OOT, yaitu obat yang seharusnya digunakan untuk pengobatan namun disalahgunakan untuk mendapatkan efek tertentu,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Taruna menjelaskan bahwa Generasi Z yang jumlahnya mencapai sekitar 71 juta jiwa atau 24,9 persen dari total penduduk Indonesia merupakan modal utama bangsa dalam menghadapi bonus demografi hingga tahun 2035. Karena itu, kualitas kesehatan fisik dan mental generasi muda harus dijaga sejak dini.

Menurut BPOM, penyalahgunaan OOT dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius.

Secara farmakologis, obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat, memicu ketergantungan, menyebabkan gangguan mental berat, kerusakan otak, hingga meningkatkan risiko kematian akibat overdosis.

“Dampak jangka panjangnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan melemahkan ketahanan bangsa,” kata Taruna Ikrar.

Selain memperkuat edukasi, BPOM juga terus meningkatkan pengawasan dan penindakan. Bersama aparat penegak hukum, BPOM berhasil mengungkap sejumlah pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memproduksi OOT tanpa izin edar.

Dari operasi tersebut, petugas menyita lebih dari 1 miliar tablet ilegal, termasuk tramadol, triheksifenidil, dan dekstrometorfan. Nilai keekonomian barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp398 miliar.

BPOM menilai penyitaan tersebut memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonominya. Jumlah obat yang diamankan berpotensi mencegah paparan penyalahgunaan terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang, terutama di kalangan remaja dan usia produktif.

“Bagi BPOM, keberhasilan tersebut tidak diukur dari nilai ekonomi barang bukti, melainkan dari berapa banyak nyawa dan masa depan generasi muda yang berhasil kita selamatkan. Penegakan hukum penting, namun pencegahan dari hulu menjadi prioritas utama,” tegas Taruna.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh sembilan pemangku kepentingan, yakni BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Melalui komitmen tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi pengawasan peredaran OOT, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan penegakan hukum secara terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan melalui musik dipilih karena dinilai efektif menjangkau kalangan

## Kemenkes dan Lancet Susun Arah Baru Sistem Kesehatan Indonesia Menuju 2045

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendukung peluncuran The Lancet Regional Health ‘Western Pacific Commission on Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 di Auditorium J. Leimena, Jakarta, sebagai langkah strategis menyusun arah transformasi kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Komisi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan jangka panjang guna menjawab tantangan kesehatan nasional di masa mendatang.

Peluncuran ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sebuah komisi di bawah naungan The Lancet, salah satu jurnal medis paling berpengaruh di dunia yang terbit sejak 1823, dipimpin bersama (co-chaired) oleh ilmuwan dan pakar kesehatan asal Indonesia. Kehadiran komisi tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan riset kesehatan global.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan kesehatan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Menurutnya, bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncak pada 2030-2035 harus dimanfaatkan melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data.

“Kita patut bangga bahwa Indonesia kini melahirkan komisi jurnal Lancet pertama yang dipimpin putra-putri bangsa. Ini menunjukkan kematangan ekosistem riset kita,” ujar Budi. Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan para peneliti untuk menyediakan bukti ilmiah dalam mengevaluasi berbagai program kesehatan yang sedang dijalankan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup menjadi 76 tahun dan harapan hidup sehat menjadi 65 tahun. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penguatan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini menjadi agenda utama Kemenkes.

remaja. BPOM akan memanfaatkan karya-karya terbaik dari Safe Sound Fest 2026 sebagai materi kampanye digital yang disebarluaskan secara berkelanjutan melalui berbagai kanal komunikasi resmi lembaga tersebut.

Secara historis, penyalahgunaan obat-obatan yang memengaruhi sistem saraf telah menjadi persoalan global selama puluhan tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam berbagai laporan menyebutkan bahwasana penyalahgunaan zat adiktif terus menja-

Founding Co-Chair Komisi Lancet Regional Health ‘Western Pacific, Dr. Sandersan Onie, menegaskan bahwa komisi ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan kelompok rentan dapat terdokumentasi dalam kajian ilmiah yang diakui dunia. “Komisi ini pada akhirnya tentang satu hal, memastikan masyarakat termiskin, terpencil, dan paling terpinggirkan dapat menjangkau layanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat pada 2045,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Editor-in-Chief The Lancet Regional Health ‘Western Pacific, Dr. Jie Cai. Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang memperoleh pengakuan internasional karena mampu memimpin langsung komisi Lancet. “Komisi ini akan menggabungkan keahlian nasional dan internasional untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang melahirkan kebijakan berkeadilan,” ujar Jie Cai.

Secara historis, Indonesia telah menjalankan berbagai reformasi kesehatan sejak penguatan sistem pelayanan primer melalui Puskesmas pada era 1970-an hingga peluncuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang kini menjadi salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia. Di tingkat global, kolaborasi antara pemerintah dan jurnal ilmiah internasional seperti The Lancet telah banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan di berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, dan Tiongkok.


Kemenkes berharap rekomendasi yang dihasilkan komisi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan sistem kesehatan masa depan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan hingga menjangkau wilayah terluar Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas internasional itu diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (ardi)

di ancaman kesehatan masyarakat dunia, terutama bagi kelompok usia muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan media sosial.

Di Indonesia, pemerintah telah memperkuat pengawasan obat dan narkotika sejak beberapa dekade terakhir melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BNN. Berbagai operasi nasional yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengungkap jaringan produksi dan distribusi obat ilegal yang menasar pelajar serta masyarakat usia produktif.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat.

“Kami mengajak masyarakat dan pelajar untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan obat serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing,” ujar Taruna menutup kegiatan tersebut. (\*)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p>  <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasctio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Kejari Jaksel Tak Menahan Roy Suryo dan dr Tifa, Wajib Lapori Tiap Pekan



Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

### Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifa setelah menerima pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya. Meski tidak ditahan, keduanya tetap diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali setiap pekan hingga proses persidangan berlangsung.

Keputusan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, di Jakarta, Senin (22/6). Menurut dia, perkara yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kini memasuki tahap penuntutan dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Marcelo mengatakan persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjuk pengadilan tersebut untuk memeriksa dan memutus perkara.

"Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini," kata Marcelo.

Kejaksaan menilai perkara tersebut perlu segera memperoleh kepastian hukum mengingat besarnya perhatian publik yang tercurah selama proses penyelidikan hing-

ga penyidikan berlangsung.

Menurut Marcelo, status perkara yang dinilai penting menjadi salah satu alasan percepatan pelimpahan berkas ke pengadilan agar proses pembuktian dapat segera dilakukan secara terbuka di hadapan majelis hakim.

"Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum," ujarnya.

Dalam proses penanganan perkara, Kejari Jakarta Selatan menerima permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum serta keluarga kedua tersangka. Permohonan itu kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sikap kejaksaan.

Pihak keluarga, kata Marcelo, menyatakan kesediaan menjadi penjamin dan siap menanggung konsekuensi hukum apabila Roy Suryo maupun dokter Tifa tidak memenuhi kewajiban menghadiri proses persidangan.

Selain adanya jaminan keluarga, kejaksaan juga mempertimbangkan surat pernyataan yang dibuat kedua tersangka. Dalam dokumen tersebut, Roy Suryo dan dokter Tifa berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung serta mematuhi seluruh keten-

tuhan yang berlaku.

"Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku," ujar Marcelo.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama proses penuntutan berlangsung.

"Maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," tegasnya.

Pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya kepada kejaksaan menandai berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan. Pada fase ini, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara didaftarkan secara resmi ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan penahanan pada tahap penuntutan berada di tangan jaksa. Namun, hukum juga memberikan ruang bagi penangguhan penahanan apabila terdapat jaminan dari keluarga, tersangka bersikap kooperatif, serta tidak terdapat alasan subjektif maupun objektif yang mendesak untuk dilakukan penahanan.

Secara historis, sejumlah perkara yang mendapat perhatian publik di Indonesia juga pernah diwarnai

kebijakan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kebijakan tersebut umumnya diberikan dengan mempertimbangkan jaminan keluarga, kepentingan kemanusiaan, maupun komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan hukum.

Di tingkat internasional, praktik serupa dikenal dalam berbagai sistem hukum modern melalui mekanisme bail atau pembebasan bersyarat sebelum persidangan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menerapkan sistem tersebut dengan tujuan menjaga asas praduga tak bersalah sembari memastikan tersangka tetap hadir dalam proses peradilan.

Pengamat hukum menilai percepatan pelimpahan perkara ke pengadilan merupakan langkah penting untuk menghindari spekulasi di ruang publik. Dengan masuknya perkara ke tahap persidangan, seluruh alat bukti dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak dapat diuji secara terbuka sesuai prinsip *due process of law*.

Kini perhatian publik tertuju pada proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperoleh kejelasan hukum atas perkara yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan masyarakat. (\*)

## Ini Isi Lengkap Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Tifa



### Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut diambil setelah adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dua figur publik, yakni Roy Suryo dan Tifa Tyassuma, serta menyeret isu sensitif terkait dugaan pemalsuan dokumen pejabat negara.

Permohonan penangguhan penahanan tersebut diajukan pada Senin (22/6) pukul 08.25 WIB, sebelum tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari Polda Metro Jaya ke Kejari Jakarta Selatan dilakukan.

Kuasa hukum kedua tersangka, Refly Harun, menjelaskan bahwa surat tersebut berisi permintaan agar kliennya tidak ditahan selama proses hukum berjalan.

"Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan," ujar Refly di Kejari Jaksel, Senin.

Dalam permohonan itu, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Roy Suryo dan dokter Tifa selama ini kooperatif dalam menjalani proses hukum, termasuk memenuhi kewajiban wajib lapor.

Mereka juga disebutkan tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak menghambat jalannya pemeriksaan perkara.

Selain itu, dalam surat tersebut

ditegaskan bahwa kedua tersangka tidak memiliki niat melarikan diri, tidak merusak barang bukti, serta tidak mengulangi dugaan perbuatan pidana yang disangkakan.

"Tidak pernah berupaya melarikan diri itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti itu juga penting," kata Refly dalam keterangannya.

Permohonan itu juga disertai jaminan dari pihak keluarga, yakni istri Roy Suryo dan anak dokter Tifa, serta dari tim kuasa hukum yang menyatakan siap memastikan kehadiran keduanya dalam setiap proses persidangan.

Menurut Refly, para penjamin menyatakan kesediaan menanggung konsekuensi apabila klien mereka tidak memenuhi kewajiban hukum, termasuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pertimbangan lain yang diajukan adalah reputasi sosial para tersangka yang dinilai memiliki lingkungan keluarga yang jelas serta dikenal baik di masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

Dari sisi penegakan hukum, Kejari Jaksel menilai terdapat cukup alasan untuk tidak melakukan penahanan dan hanya menerapkan kewajiban wajib lapor satu kali dalam seminggu.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap surat jaminan dan pernyataan ko-

operatif dari para tersangka.

"Serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcelo.

Setelah keputusan tersebut, berkas perkara Roy Suryo dan dokter Tifa dipastikan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalani proses persidangan.

Secara historis, mekanisme penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan ruang penahanan berdasarkan syarat objektif dan subjektif, termasuk risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Dalam praktik internasional, prinsip serupa juga dikenal dalam sistem 'bail' di negara-negara common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang menekankan keseimbangan antara hak kebebasan individu dan kepentingan proses peradilan.

Keputusan Kejari Jaksel ini menambah daftar kasus di Indonesia di mana tersangka tidak ditahan selama proses persidangan, selama dianggap memenuhi syarat kooperatif dan tidak membahayakan proses hukum. (\*)

## Turnamen Domino Terbuka Warnai Perayaan HUT Bhayangkara ke-80 di Baubau, Diskominfo Apresiasi Turnamen Domino sebagai Ruang Silaturahmi Warga



Turnamen Domino Terbuka yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Baubau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Turnamen Domino Terbuka yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Baubau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 mendapat apresiasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau. Kegiatan yang berlangsung pada 20-21 Juni 2026 tersebut dinilai menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aktivitas yang positif dan inklusif.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., dalam keterangan pers yang diberikan pada Senin (22/6/2026). Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung memiliki dampak sosial yang besar dalam membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan warga.

Tingginya partisipasi masyarakat selama turnamen berlangsung menunjukkan bahwa kegiatan berbasis komunitas masih menjadi salah satu media yang efektif dalam memperkuat komunikasi publik. Warga tidak hanya berasal dari Kota Baubau, tetapi juga datang dari berbagai wilayah di Kepulauan Buton untuk mengikuti kompetisi tersebut.

Dalam pandangan Diskominfo, turnamen tersebut berhasil menghadirkan suasana yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan sportivitas. Hal itu menjadi modal penting dalam memperkuat kemitraan antara institusi negara dan masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Polres Baubau. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan yang positif dan kompetitif bagi warga, tetapi juga menjadi jembatan yang kuat untuk membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat," kata H. Andi Hamzah Machmud.

Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis melalui kegiatan olahraga dan permainan rakyat telah lama menjadi salah satu strategi yang digunakan berbagai institusi publik untuk memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, permainan domino yang telah dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan memiliki daya tarik tersendiri karena mudah dimainkan dan mampu menciptakan interaksi yang cair antar peserta.

"Permainan domino yang populer di tengah masyarakat kini diangkat menjadi wadah kompetisi resmi yang sehat dan suportif. Ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi," ujarnya.

si," ujarnya.

Turnamen domino tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan Polres Baubau dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan itu juga menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang.

Secara historis, peringatan Hari Bhayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli sebagai momentum lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946. Pada 2026, institusi Polri memasuki usia ke-80 dengan mengusung semangat penguatan pelayanan publik dan kedekatan dengan masyarakat.

Di tingkat nasional, berbagai jajaran kepolisian di Indonesia setiap tahun menyelenggarakan kegiatan sosial, olahraga, bakti kesehatan, hingga kompetisi masyarakat untuk menyambut Hari Bhayangkara. Pola pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sementara itu, secara internasional, pendekatan community policing atau kepolisian berbasis masyarakat telah berkembang sejak dekade 1970-an di berbagai negara seperti Jepang, Inggris,

dan Amerika Serikat. Konsep tersebut menekankan pentingnya interaksi langsung antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

"Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat melihat bahwa kepolisian hadir bukan hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra yang dekat dengan warga," kata Andi Hamzah.

Ia berharap kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, ruang interaksi yang dibangun melalui kegiatan nonformal sering kali mampu menghasilkan komunikasi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat formal.

"Polres Baubau diharapkan dapat terus mengukuhkan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan mitra setia masyarakat, khususnya dalam menyambut usia Bhayangkara yang ke-80 Tahun 2026," ujarnya.

Dengan antusiasme masyarakat yang tinggi selama pelaksanaan turnamen, kegiatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat di Kota Baubau terus berkembang. Momentum HUT Bhayangkara ke-80 pun tidak hanya menjadi perayaan institusional, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. (\*)

Laporan: Prasetyo M

UNAHA, BP-Pemerintah Kabupaten Konawe menyiapkan sistem pelayanan terpadu bagi seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Qur'ān (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-31. Salah satu kafilah yang telah tiba di Kota Unaaha adalah rombongan Kota Baubau yang membawa 47 peserta dan puluhan official. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., di Rumah Jabatan Wakil Bupati Konawe, Minggu (21/6/2026).

Penyambutan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Kabupaten Konawe sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi yang tahun ini mempertemukan kafilah dari 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Selain menyiapkan arena perlombaan, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas peserta selama berada di Konawe.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Baubau, La Ode Maaruf, mengatakan rombongan kafilah Kota Baubau tiba melalui dua jalur transportasi. Sebagian besar rombongan menggunakan jalur laut, sedangkan sisanya menempuh perjalanan melalui jalur darat menuju Unaaha.

Menurut dia, sekitar 60 orang bersama official diberangkatkan melalui jalur laut, sementara 24 orang lainnya menggunakan jalur darat. Seluruh peserta kemudian ditempatkan di sejumlah lokasi pemondokan yang telah disiapkan panitia.

Untuk mendukung kesiapan peserta menjelang perlombaan, Pemerintah Kota Baubau membagi lokasi pemondokan ke dalam lima posko strategis di wilayah Unaaha. Skema tersebut diterapkan agar proses pembinaan, latihan, dan koordinasi peserta dapat berjalan lebih efektif.

"Dengan total 47 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba, kami berharap capaian tahun ini lebih baik dibandingkan MTQ sebelumnya. Semangat sportivitas dan kerja keras menjadi modal utama untuk mengharumkan nama Kota Baubau," ujar La

Ode Maaruf.

Sementara itu, Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim menegaskan bahwa seluruh kafilah yang datang ke Konawe akan memperoleh pelayanan maksimal selama pelaksanaan MTQ berlangsung. Pemerintah daerah telah menyiapkan pola pendampingan khusus untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar kafilah Kota Baubau di Kota Unaaha. Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan penghormatan bagi masyarakat Konawe. Semoga seluruh rangkaian kegiatan MTQ berjalan lancar dan seluruh peserta selalu dalam keadaan sehat," kata Syamsul Ibrahim.

Ia menjelaskan, setiap kafilah akan didampingi dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala bagian yang bertugas membantu berbagai kebutuhan peserta. Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan petugas protokol dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di setiap lokasi pemondokan.

"Kami telah menugaskan dua pimpinan OPD atau kepala bagian untuk setiap kafilah. Mereka akan dibantu petugas protokol dan personel Satpol PP agar seluruh kebutuhan peserta dapat terlayani dengan baik," ujarnya.

Syamsul juga meminta para Liaison Officer (LO) dan pendamping untuk terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Menurut dia, komunikasi yang intensif menjadi faktor penting untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis maupun non-teknis selama kegiatan berlangsung.

Tidak hanya berfokus pada kompetisi, Pemerintah Kabupaten Konawe juga memanfaatkan momentum MTQ sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah kepada para tamu dari seluruh Sulawesi Tenggara. Salah satu destinasi yang dibuka secara khusus adalah Bendungan Wawotobi, infrastruktur strategis yang menjadi kebanggaan masyarakat Konawe.

"Bendungan Wawotobi kami buka secara khusus untuk seluruh kafilah MTQ. Biasanya kawasan ini tidak dibuka untuk kunjungan umum, tetapi pada momentum MTQ peser-

ta dari 17 kabupaten dan kota dapat melihat langsung salah satu infrastruktur penting di Sulawesi Tenggara," tutur Syamsul.

Selain Bendungan Wawotobi, pemerintah daerah juga merekomendasikan sejumlah objek wisata lain, termasuk kawasan wisata air panas yang selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Konawe.

Lebih jauh, Syamsul menekankan bahwa nilai utama MTQ tidak hanya terletak pada kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga pada upaya memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mempererat hubungan antar masyarakat di Sulawesi Tenggara. Menurut dia, pertemuan para peserta dari berbagai daerah merupakan kesempatan berharga untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan.

Secara historis, MTQ telah menjadi agenda keagamaan nasional sejak pertama kali diselenggarakan di Makassar pada tahun 1968. Sejak saat itu, MTQ berkembang menjadi salah satu sarana pembinaan generasi Qurani sekaligus forum silaturahmi umat Islam di Indonesia. Di tingkat internasional, berbagai negara Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, Iran, dan Mesir juga rutin menggelar kompetisi tilawah Al-Quran sebagai bagian dari penguatan pendidikan keagamaan dan diplomasi budaya Islam.

Di Sulawesi Tenggara, pelaksanaan MTQ selama beberapa dekade terakhir tidak hanya melahirkan qari dan qariah berprestasi nasional, tetapi juga menjadi instrumen penguatan identitas keagamaan masyarakat daerah. Karena itu, penyelenggaraan MTQ ke-31 di Konawe dipandang memiliki makna strategis, baik sebagai ajang kompetisi maupun sebagai wadah mempererat persatuan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dengan dukungan pelayanan yang terstruktur, kesiapan panitia, serta semangat para peserta, pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ke-31 di Konawe diharapkan berlangsung sukses dan mampu melahirkan duta-duta terbaik yang akan mewakili daerah pada ajang yang lebih tinggi. (\*)